

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengharapan perluasan perikanan Indonesia mempunyai kapasitas sumber daya yang besar, menyumbang kekuatan nasional Indonesia, khususnya kepada tiga konstituen perluasan penting, yakni pertumbuhan ekonomi, pengembangan keleluasan mendapatkan pekerjaan, dan reduksi kemiskinan. Jatmiko, (2007) menyatakan bahwa di dalam struktur ekonomi negara, sektoral perikanan mempunyai peranan strategis sebagai penyedia pekerjaan dan sumber pertukaran uang asing bagi negara.

Tetapi harapan ini jauh dari realita. Departemen Kelautan dan Perikanan (2014) menjelaskan ulasan data BPS pada tahun 2015, dari 8.090 kampung pesisir (rantau) di Indonesia sebanyak 3.91 juta rumah tangga (16,42 juta orang) di masukkan ke dalam populasi miskin dengan Indeks Kemiskinan (PHI) sebanyak 0,32 . Perkara yang sama juga dinyatakan oleh Fauzi (2015), bahawa sebahagian besar rumah tangga penjala Indonesia, yaitu penjala berskala kecil (perikanan tepi laut) masih di klasifikasikan sebagai miskin dengan nafkah kurang dari US \$ 10 Dollar US per kapita sebulan.

Mengikuti situasi *Millenium Development Goals* (MDGs) menyebutkan bahwa nafkah tersebut termasuk liputan *extreme poverty* karena lebih kecil daripada US \$ 1 sehari. Penglihatan lain, Bersumber pada keputusan COREMAP (*Coral Reef Management Programme*) meliputi 10 (sepuluh) propinsi, menunjukkan nafkah penjala dalam tahun 1996/1997 hanya berkisar dari Rp 82.000 hingga Rp 200.000 per bulan (Fauzi, 2015).

Kedadaan ini menggambarkan bahawa potensi sumber laut dan perikanan tidak dapat di urus serta merta di dimanfaatkan secara penuh, sehingga mereka tidak memberikan sokongan yang relevan untuk meningkatkan nafkah pelaku penjala.

Kasus kesengsaraan di kalangan rantau di kalangan penjala, sangat berkaitan dengan kondisi potensi sumber daya perikanan, keunikan sumber daya manusia, dan infrastruktur yang tersedia. Penurunan sumber perikanan semakin meningkat disebabkan kurangnya tanggung jawab para penjala untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Ini dapat dilihat dalam indikasi bahawa penjala bebas untuk menangkap ikan berlebihan, ketiadaan kuota memancing, ketiadaan penetapan spesies ikan yang dapat ditangkap, tidak mempunyai regulasi yang mengatur musim menangkap ikan kecuali beberapa lokasi di Indonesia Timur, dan reglemen yang menetapkan jenis dan *size* peralatan penjeratan ikan, *size* dan kuantiti kapal penjeratan ikan yang dibenarkan. Ini akan memberi *impact* kepada keadaan perikanan tangkap di Indonesia yang sudah ada di titik jenuh, walaupun dinyatakan bahawa potensi potensi sumber daya perikanan (*Maximum Sustainable Yield* alias MSY) pada perkiraan di anggarkan jangkauan 6,4 juta ton per tahun, saat ini 72% telah di gunakan dan jika rujukannya adalah jumlah Tangkapan yang Di bolehkan (JTB) atau Total Allowable Catcher (TAC) yang 80% dari potensi lestari (5,12 juta ton), maka sebenarnya penggunaan sumber ikan mencapai 90% (Nikijuluw, 2005).

Kemiskinan dipercayai sebagai salah satu penggerak merosotnya sumber daya ikan ,sementara ketiadaan mata pencarian alternatif dan kekurangan pengetahuan, dan modal, membuat pantai (zona dengan produktivitas dan

berbagai sumber daya yang tinggi) juga mengalami tekanan penjeratan ikan yang besar, yang mengakibatkan penjeratan ikan merosot.

Beberapa penjelasan di atas menunjukkan bahawa penjala masih lemah dalam rangkaian (*networking*) untuk modal kordial yang mewujudkan salah satu pilihan untuk mengatasi kekemelaratan memperlihatkan, kesehatan, pendidikan dan ketersediaan modal ekonomi di tingkat rumah tangga walaupun sebanding dengan modal manusia dari segi modal kordial non fisik yang menandingi modal fisik (Grootaer, 2002). Pendapat ini sememangnya tidak lengkap jika perspektif institusi, organisasi kordial, norma, kepercayaan dan rangkaian kordial tidak dianalisa dengan terperinci dengan menyatakan analisis peranan penjala dan anggota keluarga mereka. Oleh karena itu, beragam tahap ketersediaan sumber-sumber kordial antara individu, kumpulan, atau komuniti tertentu didominasi oleh sumbangan jaringan kerja atau kalangan kordial kordial.

Konsep rangkaian (*networking*) ada unsur kerja melalui hubungan kordial menjadi kolaborasi. Pada dasarnya, rangkaian kordial dibentuk karena memiliki pengetahuan bersama, memaklumkan antara satu sama lain, mengingatkan antara satu sama lain dan membantu antara satu sama lain dalam melaksanakan atau mengatasi masalah penjala pada hubungan antara kumpulan yang membolehkan aktivitas-aktivitas ini berjalan lancar dan efektif (Lawang, 2005).

Berasaskan maklumat di atas, Pemerintah telah membuat bermacam dasar pembaharuan perikanan yang bertujuan untuk menumbuhkan kemakmuran penjala dan mengurangi kemiskinan. Ini mengindikasikan bahwa dalam mengatasi keniscayaan modal masyarakat rantau, terutamanya penjala kecil, Penabiran melalui Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dan institusi

keuangan telah menghasilkan deregulasi berkaitan hambatan *financial Capitals* dalam sektor perikanan.

Walau bagaimanapun, perkembangan perikanan hingga saat ini tidak memberikan sumbangan ekonomi maksimal kepada perolehan devisa negara, penyediaan pekerjaan, meningkatkan nafkah dan kemakmuran para penjala.

Fatchudin, (2006) menyatakan bahwa hal itu bermula: (1) Kebanyakan penjala masih penjala tradisional jenis sosial budaya yang tidak kondusif untuk maju;(2) Struktural barisan penjeratan ikan yang mayoritas dikuasai oleh skala kecil dengan kemampuan sains dan teknologi yang rendah; (3) Tahap penggunaan stok ikan antara satu wilayah dan wilayah lain masih tidak seimbang; (4) Masih banyak kegiatan penjeratan ikan yang tidak sah, tidak dilaporkan, tidak terkawal (*illegal, unreported,unregulated atau IUU*) yang berlaku akibat sistem pengawasan dan pengawasan yang lemah, serta *law enforcement* yang rendah di laut Indonesia; (5) Infrastruktur perikanan untuk perniagaan penjeratan ikan tidak mencukupi; (6) Masalah kebinasaan terhadap ekosistem dan alam sekitar pantai akibat penambangan dan aktivitas manusia yang lain; (7) Rendahnya kemampuan pemrosesan produk perikanan pasca panen dan; (8) Kecerdasan pasar yang lemah, yang termasuk menguasai informasi dari pesaing, segmen pasar, rasa pengguna, dan akses pasaran; (9) *Management information system* yang lemah berdasarkan teknologi informasi dalam menyediakan data yang tepat dan tepat pada masanya; (10. Pengetahuan bio teknologi kelautan dan perikanan yang masih minim; (11) Sarana pendukung serta lembaga yang terkait mengurus permasalahan penjala dan perikanan belum optimal; (12) *Public Policy* (kebijakan publik) dan aturan di bidang perikanan yang terintegrasi dengan pemangku

kepentingan (*stakeholders*) perikanan yang lain belum optimal , dan lemahnya akses permodalan.

Pemikiran Campbell, (2000) menggambarkan penghidupan berkelanjutan (*the sustainable livelihoods frameworks*), sehingga setiap kebijakan pemberdayaan pemukiman perikanan harus disesuaikan dengan kondisi warga dan potensi sumber daya perikanan yang tersedia. Konsep ini menunjukkan bahawa untuk membina mata pencarian yang mumpuni adalah niscaya untuk memberi perhatian kepada aset yang dimiliki oleh komuniti warga pantai (penjala), yang termasuk (1) aset manusia, termasuk pengetahuan, kemahiran dan kebolehan; (2) *natural assets*, aset sumber daya alam di sekelilingnya; (3) aset kordial, perhatian yang diperoleh dari komuniti dan kalangan keluarga; (4) aset fisik, infrastruktur yang boleh digunakan, dan (5) *financial assets*, modal yang bisa diperoleh untuk aktiviti perniagaan yang dijalankan.

Kajian tentang *social assets* sebagaimana yang dikemukakan Campbell (2000), bahwa bagi rumah tangga (RT) penjala menjadi sangat relevan, mengingat masih belum ditemukan bagaimana pola keragaman pekerjaan dalam rumah tangga penjala, kombinasi kordial pekerjaan rumah tangga penjala (penjala) sangat preferensi ideal hingga penjala dapat keluar dari kemiskinan. Hal tersebut menjadi sasaran fokus penelitian ini dengan melihat berbagai permasalahan semangat penjala.

Potensi perairan laut yang beranekaragam dan upaya yang dilakukan penjala bervariasi disebabkan oleh hambatan pemahaman dan kebiasaan teknologi, niscaya menyediakan preferensi di gunakan sumber daya di zona rantau, supaya pemanfaatan zona rantau dapat dilakukan secara optimal untuk

menumbuhkan kemakmuran.

Keberagaman perniagaan di beberapa zona pantai niscaya dilaksanakan, supaya komunitas rantau bukan sahaja terpusat di perniagaan sambaran ikan, bukan saja juga boleh di arahkan ke perniagaan di luar kawasan sambaran ikan. Keberagaman tidak sahaja memberikan nilai tambah ekonomi bagi warga rantau, khususnya penjala, yang mempunyai probalitis untuk menumbuhkan nafkah mereka apabila tidak memancing kerana terdapat pangkal nafkah dapat menyokong semangat para penjala.

Peningkatan nafkah dari sektor lain adalah sebagian daripada keberagaman kegiatan perniagaan masyarakat pantai yang dapat menggalakkan warga untuk tidak merusakkan persekitaran pantai dan secara tidak langsung telah membantu pemulihan kawasan rantau dari eksploitasi yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh itu, keberagaman semangat penjala adalah perihal yang niscaya dikaji secara mendalam (Elfindri, 2003; Efyet, 2013).

Elfindri, (2002) menjelaskan bahwa lapangan pekerjaan selain penjeratan ikan yang sudah dilakukan oleh penjala dan anggota keluarganya dengan alasan pertama adalah masih ada kaitannya dengan perikanan, yang lazim disebut dengan Off-fishing employment. Pekerjaan yang berkaitan dengan perdagangan ikan, pengolahan ikan atau industri pengolahan ikan dan kegiatan yang tidak berkaitan dengan usaha perikanan. Alasan *kedua* adalah rumah tangga penjala dengan pekerjaan yang dilakukan oleh anggota rumah tangga (istri dan anak dewasa) di luar sektor perikanan. Kategori ini disebut dengan *non fishing employment*.

Oleh karena kegiatan usaha di luar perikanan mewujudkan salah satu bentuk strategi adaptasi yang dapat dilakukan oleh rumah tangga penjala dalam meningkatkan nafkah total keluarga disebabkan keadaan ekonomi yang tidak stabil, maka penjala harus mampu untuk beradaptasi yakni salah satunya dengan melakukan diversifikasi usaha yang merupakan strategi untuk meningkatkan nafkah sebagai preferensi mata pencaharian yang dilakukan penjala di bidang perikanan maupun non perikanan. Kita belum mengetahui strategi adaptasi pekerjaan dalam kombinasi dengan pilihan, mana yang lebih membuat rumah tangga penjala semakin dapat keluar dari kemiskinan atau yang memberikan sokongan terbesar pada nafkahnya, begitu juga faktor apa yang paling menentukan dalam kombinasi pekerjaan.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batubara mengalami penurunan tahun 2015 sebesar 5,36% dibandingkan tahun 2014 sebesar 6,91%. Penurunan terjadi disebabkan adanya penurunan dari sektor pertanian, perdagangan dan industri. Struktur ekonomi di Batubara secara garis besar terbagi tiga yaitu pertanian 15,37% tahun 2015, industri pengolahan 53,55% dan perdagangan, hotel dan restoran sebanyak 22,72% selama lima tahun terakhir.

Transformasi struktur ekonomi dapat dilihat Kabupaten Batubara memiliki struktur industri yang seharusnya mampu menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan.

Peningkatan orang miskin di Daerah Batubara pada tahun 2011 adalah sama dengan 46,000 ribu orang atau sama dengan 18,12%. Peningkatan penempatan pemetaan tidak diketahui. alisis kajian ini akan dijalankan untuk membuktikan pemetaan kemiskinan berdasarkan beberapa anggaran yang

kemudiannya dijumpai untuk setiap pemetaan sebagai asas untuk dampak pengurangan kemiskinan. Keadaan penempatan miskin di pengaruhi oleh rendah dan sederhana, di mana Indeks Pembangunan Manusia Pembangunan Batubara (IPM) pada tahun 2015 adalah kebanyakannya 72.05 lebih rendah daripada indeks pembangunan manusia re-rata Sumatera Utara kebanyakannya 74.53.

Berdasarkan data yang diambil pada tahun (2016) di Kabupaten Batubara, sebanyak 22.583 rumah tangga telah memanfaatkan potensi laut sebagai sumber nafkah. Kategori penjala penuh waktu terdiri dari 10.876 rumah tangga atau 5.292 rumah tangga perikanan, penjala sambilan utama 6.415 rumah tangga dan penjala sambilan tambahan. Merujuk data diatas, jumlah terbesar penjala yang memanfaatkan laut terbanyak penjala sambilan utama.

Dalam tiga tahun terakhir terjadi penurunan kualitas produksi perikanan tangkap. Hal tersebut terlihat dari data Kabupaten Batubara, di tahun 2014 sebanyak 5.226,40 ton, menurun menjadi 3.744,14 ton di tahun 2015 dan di tahun 2016 lebih rendah lagi yaitu 2.907,24. Begitu juga keunikan kalangan rantau, tingkat kebinasaan hutan bakau di sebarakan di 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Batubara. hamparan hutan bakau perkiraan 9.193 Ha, ke binasaan terjadi sehamparan 4.898,14 ha atau bervariasi antara 26,75 % di setiap kecamatan (Dinas Kehutanan Kabupaten Batubara, 2017).

Tekanan penduduk, pengetahuan terhadap mengenai fungsi hutan bakau, faedah jangka pendek yang tidak peduli dengan penggunaan tanah dan fungsi hutan, penjelasan tanah hutan secara besar-besaran untuk perniagaan tambak dan pemendapan yang disebabkan oleh banjir kilat pada tahun 2000 di rantau pantai selatan menyebabkan kemusnahan.

Tahap pendidikan yang rendah adalah penyebab potensi penempatan penempatan semula bukan yang terbaik. Di daerah arang batu tingkat rata-rata pendidikan penduduk umur 7 tahun ke atas kebanyakannya adalah tingkat sekolah rendah 30,78% dan tingkat menengah junior di tingkat atas sebagian besar adalah 11,30%. Lebih dari 40% warga negara berumur 7 tahun ke atas mempunyai ijazah maksimum di sekolah rendah dan menengah.

Faktor penyebab kemiskinan yang dominan adalah rendahnya tingkat pendidikan. Tali peranti maupun kebiasaan warga sering melaksanakan pesta juga menjadi faktor yang menyebabkan kemiskinan. Pesta yang dilaksanakan baik berupa pesta adat, pesta pernikahan, pesta agama juga pesta kematian. Di setiap pesta tersebut harus dilaksanakan oleh setiap keluarga. Dan pesta menjadi tanggung jawab kordial, dan kondisi tersebut menyebabkan penjala terjebak hutang.

Bersumber pada informasi dari Dinas Perikanan Kabupaten Batubara, (2018) menyebutkan bahwa pemerintah telah memberikan pelatihan terhadap penjala di Batubara berupa menangkap kegiatan program pembangunan perikanan dan latihan teknis nelayan perikanan, kegiatan latihan untuk membuat makanan jeruju, memajukan kelompok orang luar Batubara untuk mengembangkan semangat ekonomi dan kesejahteraan. Pemerintah menjadi fasilitator terhadap pengembangan ekonomi penjala, yang mana upaya *networking* yang tersebut di atas mencorakkan upaya penurunan kemiskinan pada penjala dalam menjalin jaringan kerja dan kordial di Kabupaten Batubara. Warga menyadari bahwa kegiatan dari beraneka macam program Dinas Perikanan masih belum optimal

dikarenakan minimnya bantuan pemerintah berupa modal dan fasilitas sarana prasarana melaut sebagai penjala.

Menyedari masalah di atas, penulis berpendapat bahwa dalam mengatasi masalah kemiskinan yang memberi kesan mengancam kemuskilan zona luar negeri di Kabupaten Batubara, penyelidikan mengenai pengesahan kekuasaan sumber daya rantau adalah sesuai. Model ini di bangun sebagai perniagaan dari rantau / keluarga dan ahli keluarga. Sehingga kebajikan penjala dapat di tingkatkan tanpa melakukan tindakan yang merusak

Penganekaragaman kegiatan usaha atau diversifikasi usaha mencorakkan kegiatan yang bertujuan menaikkan taraf hidup masyarakat rantau. Masyarakat rantau yang mendiami wilayah tersebut mempunyai alternative usaha selain menangkap ikan di laut.

Mayoritas profesi masyarakat rantau di wilayah kabupaten Batubara adalah penjala. Selain penjala, petani / peternak juga memanfaatkan sumber daya laut guna meningkatkan nafkah. Penjala mempunyai peralatan tangkap sederhana, hewan peliharaan, serta jika keadaan cuaca buruk untuk melaut beralih membuat garam, kapur, arang dengan memaksimalkam potensi hutan mangrove yang berada disana.

Pola usaha masyarakat rantau hanya terdiri dari penjala penuh, petani atau peternak penuh dan eksekutor jasa zon. Hal ini menimbulkan kekhawatiran rawan terhadap kebinasaan zona dan ekosistem di sekitarnya. Eksploitasi yang sembarangan akan merusak kelestarian zona. Wilayah rantau Kabupaten Batubara kurang memperhatikan potensi yang berada di laut maupun daratan.

Cara megoptimalkan potensi yang berada di wilayah rantau melalui pelaksanaan diversifikasi. Diversifikasi dapat digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi yaitu meningkatkan nafkah masyarakat.

Kabupaten Batubara memiliki potensi pengusahaan ikan, palawija, ladang, pengusahaan ternak dan pengusahaan hutan, serta probalitas lain yang masih bisa diusahakan oleh masyarakat. Laporan BPS Kabupaten Batubara (2007) memberikan data potensi probalitas pengembangan, juga dapat dilaksanakan di wilayah rantau. Yang niscaya dijadikan estimasi adalah kesesuaian lahan dan daya dukung wilayah rantau.

Ancangan manajemen zona dilakukan dengan dua cara yang paradoksal yakni *state - based* dan *community - based*. Aplikasi diversifikasi niscaya menjajaki kesiapan masyarakat mengaplikasikan usaha. Kedudukan komunitas di bawah jepitan dan menerima paksaan atas kemauan pengambil strategi. Karena kedua pendekatan tersebut bisa saja mengalami kekandasan (Slingsby, 1986; Davidson dan Pelternburng, 1993; Oetomo, 1997) menyatakan dua pendekatan, penghampiran mengelola zon mendasari pelaku tunggal. Kelemahan paradigma *state based* tidak fleksibel, kapasitas kelembagaan yang lemah, disain yang kurang tepat serta partisipasi dari masyarakat yang kurang. Sehingga pendekatan ini sering mengalami kegagalan.

Pendekatan ini dalam bentuk top down yang menganggap bahawa rakyat tidak mempunyai kemahiran untuk menguruskan sumber dan bahawa tidak ada maklumat yang diperlukan memerlukan penglibatan yang sewajarnya dalam melaksanakan tindak balas reka bentuk (Williams, 1997).

Kelemahan dalam rundingan berasaskan negeri adalah punca pendekatan masyarakat. Prinsip yang di tekankan oleh pendekatan berasaskan komuniti adalah pemberian kuasa dan tanggung jawab penuh masyarakat untuk menjadi lebih aktif dalam mengurus penempatan dan ekosistem. Pendekatan bawah, yang berasal dari bawah hingga menyalurkan aspirasi, wewenang dan tanggung jawab pemerintahan daerah, berbeda dari yang berasaskan yang berasal dari atas ke bawah.

Berdasarkan pendekatan berasaskan komuniti, faksi yang berkaitan dengan pengurusan adalah masyarakat, walaupun pemerintah dan swasta tidak bersifat frontal dalam memberikan impuls. Penganjur atau penderma dalam proses tatap muka adalah pemerintah, untuk pecahan masyarakat sebagai pengamal utama dan NGO yang menyediakan informasi mengenai data yang terkait dengan realisasi kejuruteraan. (Gilbert & Wrrad, 1984; Oetomo, 1997; Schubeler, 1996)

Kekurangan dekatan berasaskan komuniti mengikut (Lee, 1994) termasuk: (1) organisasi komuniti yang masih pudar (kemahiran kecil dalam menguruskan peruntukan pertikaian, (2) data dan kepakaran yang terhad (3) sistem sokongan yang tidak disepadukan seperti data pasaran, , pekerja mahir, keupayaan pengiktirafan dan garis garisan yang berkaitan. Dari pendekatan respons, pendekatan berasaskan perkongsian dan penyertaan muncul.

Dalam kajian Putri (2004), integrasi sistem pertanian bercampur iaitu campuran yaitu persil pendaman, penanaman tanaman, penanaman, tumbuh-tumbuhan di wilayah rantau dengan penanaman haiwan di satu kawasan bersepadu dapat memberikan hasil yang optimum.

Kepelbagaian perniagaan yang tidak dibenarkan antara komoditi, pengaturan lain yang dilakukan oleh nelayan seperti sistem ikan sejuk (proses penyimpanan ikan menggunakan peningkatkan yang sejuk) sehingga dapat mengatasi masalah pengawalan ikan dalam proses penangkapan, mengangkat dan menyimpan ketika digunakan sebagai barang olahan (Efriyanto dan E. Liviawaty, 1993).

Beberapa kajian telah membuat beberapa model kepelbagaian perniagaan yang bertujuan untuk memanfaatkan taktik secara optimum, memupuk kemakmuran pemukim dengan memberikan potensi terbaik mereka. Walau bagaimanapun, kajian percubaan dilakukan untuk menunjukkan sokongan langsung penduduk di luar negara dalam merancang tempoh masa pada waktu yang bijak untuk memisahkan perniagaan.

Penalihan menjadi kenyataan jika situasi yang di kaji di kaitkan melalui peningkatan kelemahan penyelesaian wilayah yang akan dilakukan secara serentak dalam reka bentuk yang dapat diverifikasi terbukti menjadi emperikal, berhasil mengesahkan semua kemampuan dan pekerjaan yang di lakukan oleh warga negara tersebut di kurangi dengan apa saja program.

Gambaran potensi usaha yang tepat di dapatkan dari hasil analisis yang sesuai dengan faktor yang mempengaruhinya, selain itu rekomendasi model dari hasil penelitian dapat di implementasikan di daerah yang memiliki karakteristik miskin sumber daya seperti Kabupaten Batubara.

1.2 Perumusan Masalah

Pembangunan Nasional di Indonesia telah dilakukan dalam waktu lama yang selalu dihadapkan pada masalah klasik adalah kemiskinan. Walau

bagaimanapun, masalah kemiskinan adalah perkara yang mudah, kerana pada masa ini dasar anti-kemiskinan yang di rumuskan oleh pemangku tata pamong tidak menemukan formula yang berkesan untuk menyelesaikan masalah kesusahan berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan, sembari fakta memperlihatkan bahwa pembangunan bangsa Indonesia secara umum mengalami pertumbuhan ekonomi 5 % sampai dengan 7% setiap tahunnya. Berbagai program Anti kemiskinan yang dikucurkan pemerintah laksana Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras bersubsidi untuk rakyat miskin (R A S K I N), bantuan pendidikan dan bantuan kesehatan sudah lama dilakukan oleh pemerintah akhirnya hanya mampu mengurangi 6-7% angka kemiskinan.

Kajian-kajian mengenai strategi mengenai peningkatan nafkahpun sudah banyak dilakukan melalui metoda diversifikasi penjala (*fishing*) dan nafkah berkelanjutan bagi penjala yaitu (*off Fishing*), namun belum memberikan peran serta atau membangkitkan nilai ekonominya sehingga rumah tangga penjala kesulitan untuk keluar dari kemiskinan.

Beralaskan latar belakang dan problema di atas, maka perumusan masalah boleh diambil seperti berikut :

- 1) Bagaimanakah bentuk diversifikasi yang ada pada rumah tangga Nelayan di Kabupaten Batubara.
- 2) Bagaimanakah kontribusi diversifikasi yang paling tinggi terhadap pengurangan kemiskinan Nelayan di Kabupaten Batubara?
- 3) Apakah yang menyebabkan diversifikasi penjala yang berdampak pada pengurangan kemiskinan Nelayan di Kabupaten Batubara?

- 4) *Apakah networking* bisa mendukung nilai ekonomis penjala yang berdampak pada pengurangan kemiskinan Nelayan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk tujuan penyelidikan ini untuk:

- 1) Menemukan bentuk diversifikasi ekonomi mana yang paling konsisten dalam menumbuhkan nilai ekonomi (*economic value*) dan menurunkan kemiskinan di Kabupaten Batubara.
- 2) Menemukan faktor utama yang menjelaskan diversifikasi yang paling ideal dalam konteks pengentasan kemiskinan di Kabupaten Batubara.
- 3) Menemukan penyebab atau indikator terhadap diversifikasi agar berdampak pada pengurangan kemiskinan.
- 4) Menemukan *networking* yang sesuai dengan kebutuhan terhadap diversifikasi untuk menurunkan kemiskinan.

1.4 Manfaat Penelitian

Faedah penyelidikan ini adalah untuk :

- 1) Penemuan selaku akademik, mana diantara kombinasi usaha dalam rumah tangga Nelayan yang memberikan sumbangan terbesar, dan secara akademik dapat ditemukan faktor utama.
- 2) Sebagai masukan/input bagi Pemerintah Propinsi Sumatera Utara bagaimana mendorong diversifikasi usaha rumah tangga nelayan dalam mengentaskan kemiskinan.
- 3) Merumuskan model kebijakan yang efektif dalam rangka mengentaskan kemiskinan rumah tangga nelayan di Propinsi Sumatera Utara. Sebagai bahan

rekomendasi kebijakan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara untuk menurunkan angka kemiskinan di daerah tepi laut.

- 4) Memberikan solusi *networking* yang sesuai dengan kebutuhan nelayan, agar menjadi perhatian yang serius bagi Pemerintah setempat maupun Pemerintah pusat dalam menyediakan sarana prasana yaitu fasilitas jaringan kerja dan sosial.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Skop kajian terdiri daripada:

- 1) Ruang Lingkup Teoritis/ Konseptual

Penelitian ini fokus pada pengaruh diversifikasi usaha dan *economic value* terhadap nelayan. Ruang lingkup penelitian ini di fokuskan pada menemukan bentuk diversifikasi ekonomi mana yang paling konsisten dalam menumbuhkan nilai ekonomi (*economic value*) untuk menurunkan kemiskinan di Kabupaten Batubara serta menemukan faktor utama yang menjelaskan diversifikasi yang paling ideal dalam konteks pengentasan kemiskinan di Kabupaten Batubara.

Penelitian ini mengungkap bagaimana pengaruh diversifikasi usaha dan *economic value* terhadap penurunan kemiskinan sehingga sehingga rumah tangga miskin tidak semakin terpuruk. Apakah diversifikasi usaha yang di lakukan oleh *fishing* dapat menjawab persoalan kesulitan ekonomi rumah tangganya sehingga dapat keluar dari kemiskinan.

Pelaksanaan penelitian ini memiliki 3 variabel yaitu diversifikasi usaha, *economic value* dan kemiskinan. Variabel diversifikasi usaha terbagi menjadi 2 yaitu *fishing* dan *non fishing*. Variabel diversifikasi usaha mengacu pada teori Griffin, (2002) menyebutkan bahwa terdapat tiga jenis kepelbagaian perniagaan

yang di jalankan oleh beberapa sarikat, iaitu kepelbagaian hubungan perniagaan dan perniagaan yang tidak berkaitan. Adapun variable *economic value* merujuk pada teori konsep *economic value* yang menjelaskan perhitungan *Economic Value Added* (Tunggal, 2008), sedangkan kemiskinan merujuk pada Badan Pusat Statistik Sumatera Utara tentang angka kemiskinan pada penduduk Kabupaten Batubara. Penelitian ini akan mengungkapkan pengaruh *variabel independent* (*diversifikasi usaha dan economic value*) terhadap *variable dependent* (kemiskinan).

2) Ruang Lingkup Kontekstual.

Kajian ini dijalankan di Daerah Batubara, Provinsi Sumatera Utara terhadap Penjala yang berdomisili di rantau. Kajian menggunakan metode kuantitatif dengan jumlah Populasi 385 orang.

3) Ruang Lingkup Spasial/ Geografis

Kajian ini di jalankan di Daerah Batubara di Provinsi Sumatera Utara yang mencorakkan daerah pemekaran mulai tahun 2001 sampai tahun 2008. Kemudian dipilih daerah pemekaran yang berbasis rantau. Daerah pemekaran tersebut terdiri atas :a) Kabupaten Serdang Bedagai, pemekaran dari Kabupaten Deli Serdang, b) Kabupaten Nias Selatan, pemekaran dari Kabupaten Nias, c). Kabupaten Toba Samosir, pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara, d). Kabupaten Batubara, pemekaran dari Kabupaten Asahan, e) Kabupaten Nias Barat, pemekaran dari Kabupaten Nias, f) Kabupaten Nias Utara, pemekaran dari Kabupaten Nias. Berlandaskan jumlah lokasi penelitian yang menjadi sekaligus menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Kabupaten yang memiliki daerah rantau terbesar adalah Kabupaten Batubara.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematik penulisan disertasi ini terdiri dari pada 5 (lima) bahagian Bab seperti berikut:

- BAB I : Pengenalan, yang terdiri daripada latar belakang sub bab, rumusan masalah, objektif penyelidikan, faedah penyelidikan, skop penyelidikan dan sistematik penulisan.
- BAB II : Tinjauan pustaka, menerangkan dengan lebih terperinci mengenai teori-teori yang berkaitan dengan perbincangan penyelidikan iaitu definisi kemiskinan, teori kepelbagaian perniagaan, nilai ekonomi, penyelidikan sebelumnya, kerangka konseptual dan hipotesis.
- BAB III : Kaedah penyelidikan, di dalam bab ini menggambarkan jenis penyelidikan, jenis data, pengumpulan data, tempat dan masa penyelidikan, populasi dan sampel, definisi operasi variabel, instrumen penyelidikan, kaedah analisis data dan uji hipotesis.
- BAB IV : Gambaran umum obyek penelitian dilihat dari data kemiskinan di kabupaten Batubara. Pada sub bab ini selain membahas nafkah dan potensi daerahnya juga membahas karekteristik responden yang menggambarkan kondisi sampel rumah tangga *Fishing* dan data hasil tanggapan responden untuk dilakukan uji validitas dan realibilitas.
- BAB V : Keputusan penyelidikan dan perbincangan. Dalam sub bab, hasil kajian di terangkan diversifikasi usaha *fishing* dan *non fishing*, dengan analisa *Confirmatory Factor Anallysis* (CFA) yaitu *measurement model* dan *strucctual equattion model* (SEM).

sedangkan sub pembahasan menguraikan hasil yang diperoleh berdasarkan pemrosesan data menggunakan kaedah SEM (*Structural Equation Modeling*)

BAB VI : Penutup, yang terdiri sub kesimpulan dan implikasi kebijakan serta kelemahan penelitian.

